

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

William Wijaya¹, Agus Defri Yando²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb170810079@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Every region are required to be able to manage their respective region due to regional autonomy in Indonesia. Local tax and retribution play an important role in the management of a region because each region needs funds to manage their region. The Community is expected to increase their knowledge and fulfill their obligation to pay local tax and retribution. This study aims to analyze the effect of local tax revenue and retribution on regional income of Batam City. This study is quantitative research. Data obtained by documentation and using secondary data. The data is processed through the SPSS Version 25 Program. The result of this study showed that local tax (X1) has a significant effect on regional income. Reginal retribution (X2) has a significant effect on regional income. Both local tax and retribution have a significant effect on regional income of Batam City.

Keyword: Local Tax; Regional Autonom; Regional Income; Regional Retribution.

PENDAHULUAN

Banyak negara yang besar didunia, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang terbesar, negara yang terdiri dari wilayah provinsi dan wilayah provinsi terdiri lagi *area* kota dan kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, setiap daerah memiliki kewenangan menjaga dan membenahi sendiri perkara daerahnya agar menaikkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah dan juga jasa terhadap rakyat daerah. Kota Batam adalah kota besar diwilayah provinsi Kepulauan Riau dan juga kota yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Kota yang satu ini sangat memerlukan dana yang besar untuk dapat berkembang terutama dalam sektor infrastruktur dan pembangunan. Selain dari pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Batam juga berupaya secara giat memaksimalkan sumber asal pendapatan daerah yang berasal dari tempatnya sendiri. Kondisi ini agar pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat. Tindakan manajemen laba (earning manajemnt)

telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui(Banjarnahor & Yando, 2018).

Untuk mengelola pemerintahnya, wilayah berwenang melakukan pungutan terhadap rakyat. Perpajakan adalah contoh wujud kenegaraan yang tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pembebanan pungutan terhadap masyarakat adalah wajib hukumnya seperti retribusi dan pungutan lain seperti yang telah tercatat pada Undang-Undang yang ada. Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan dengan Undang-Undang No.25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat didaerah diperbolehkan mengatur dirumah tangganya sendiri serta bertanggungjawab. Pemerintah daerah tidak didomisili oleh pemerintah pusat, dalam latar belakang desentralisasi tugas pemerintah yaitu melaksanakan supervisi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perwujudan otonomi daerah. Wewenang dikasih kepada pemerintah daerah untuk

mengendalikan dan membenahi permasalahan mereka sendiri.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengeksplorasi potensi yang bisa menambah pundi-pundi keuangan sesuai dengan penjelasan perundang-undangan. Pemberian kekuasaan dalam penguasaan pajak diharapkan dapat memajukan pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (Lubis & Yando, 2019). Otonomi daerah memiliki arti kebebasan dan kemandirian. Maksud yang terkandung pada “kebebasan dan kemandirian” ialah wujud pemberian kesempatan dan tugas yang wajib diselesaikan dan dipertanggung-jawabkan serta pemberian wewenang dan kepercayaan untuk mengatur dan menetapkan sendiri cara menyelesaikan tugas (Cornelis, 2016:82). Faktor sampingan yang menentukan penerapan otonomi daerah dapat berjalan secara maksimal ialah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan yang dia miliki.

Dua sumber dana bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk melakukan pembangunan yaitu pajak dan retribusi daerah. Tetapi pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak dan retribusi daerah sangat minim, padahal kapasitas pajak dan retribusi daerah sangat krusial bagi daerah tersebut. Setelah otonomi daerah dijalankan di Indonesia, pembiayaan pemerintah daerah sangat berdampak pada daerah. Daerah terus dipaksa untuk pandai mencari dan kreatif dalam pencarian sumber penerimaan yang mendukung pengeluaran daerah akibat diterapkan otonomi daerah. Pemberian otonomi yang luas mengakibatkan sumber-sumber pendapatan banyak yang berpindah kedaerah.

Pendapatan asli daerah adalah hal yang sangat berharga karena independensi daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dinilai dari PAD. Penerimaan pajak dan retribusi yang besar akan berpengaruh besar juga bagi pendapatan asli daerah. Hal ini membuat pemerintah harus memaksimalkan potensi pajak dan retribusi agar menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pengetahuan tentang pendapatan asli daerah harus diajarkan kepada semua daerah yang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat, karena pendapatan asli daerah yang efektif dapat menutupi biaya yang mereka keluarkan. Dapat kita pantau bahwa banyak kota/kabupaten memiliki potensi yang besar tetapi belum dapat dimaksimalkan dan dikelola.

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam?
3. Apakah penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ?

Berlandas pada paparan latar belakang masalah, sehingga penulis terdorong untuk mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil daerah dalam memaksimalkan dana untuk menjalankan desentralisasi yaitu otonomi daerah (Putra, 2018:150). Pendapatan asli daerah adalah salah satu faktor penerimaan yang krusial sehingga pertumbuhannya harus terus dipaksakan. Kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting dalam pembiayaan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Untuk mendapatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan, terdapat beberapa hal yang dapat mengoptimalkan PAD yang bisa dicoba antara lain sebagai berikut (Putra, 2018:166):

1. Tingkat inflasi dan perkembangan harga harus menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Hal ini mesti dilakukan dikarenakan tarif pajak yang banyak yang telah ditetapkan sejak dulu kala dan tidak pernah diubah. Hal ini berkonsekuensi pada penetapan tarif yang ada terlalu kecil dibanding dengan perkembangan harga.
2. Undang-Undang yang berlaku menetapkan berbagai macam pajak baru terhadap potensi wajib pajak yang ada di daerah disitu.
3. dengan adanya pihak swasta dalam mengelola objek pajak tertentu dapat menambah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Membuat iklim dan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan perekonomian dan daerah serta meringankan investor domestik dan asing untuk menjalankan investasi di daerah.
5. Teruntut bagi pejabat dan karyawan yang mengelola pendapatan secara baik, sistem insentif yang didapat akan meningkat.
6. Intensifikasi merupakan metode yang dilaksanakan dari dalam untuk menaikkan nilai pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan prosedur keuangan dan kualitas pelayanan yang baik agar kepercayaan rakyat bertambah, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Asal sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbagai atas (Putra, 2018:80):

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2.2 Pajak Daerah

Pajak merupakan pembayaran masyarakat kepada kas negara yang bisa dipakai untuk melunasi pengeluaran umum serta dapat dipaksakan tanpa mendapatkan timbal balik secara instant berdasarkan undang-undang yang telah

berlaku (Mardiasmo, 2016:1). Menurut (Suandy, 2014:9), pajak adalah pembayaran ke kas negara yang harus dijalankan oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat hasilnya secara spontan dan bisa digunakan untuk menagih utang itu, contohnya seperti penyitaan, surat paksa atau bahkan penyanderaan terhadap pembayaran pajak. Suatu pajak yang sehat mempunyai beberapa prinsip yaitu (Putra, 2018:177), yaitu prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi.

Ada beberapa kriteria pajak daerah, yaitu (Putra, 2018:180)

1. Pungutan bukan retribusi melainkan bersifat pajak. Pungutan tersebut wajib sejalan dengan pengertian pajak yang telah diterapkan pada undang-undang yaitu kontribusi yang harus dilakukan oleh perseorangan atau badan terhadap daerah.
2. Objek pajak berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang berkaitan dan memiliki mobilitas yang lumayan rendah dan hanya melayani masyarakat lokal.
3. Objek dan awal pembebanan pajak tak berlawanan dengan kepentingan umum dengan memberatkan segi sosial, ekonomi, kedamaian dan keseimbangan politik, pertahanan keamanan dan budaya.
4. Potensi pajak yang memadai, yaitu hasil pendapatan pajak wajib lebih tinggi dari ongkos pemungutan.
5. Objek pajak tidak termasuk objek pajak pusat. Macam pajak yang berlawanan dengan persyaratan ini, contohnya pajak ganda (double tax) merupakan pajak dengan dasar pengenaan pajak atau objeknya semua atau sebagian diterima oleh daerah.
6. Berakibat dampak ekonomi yang positif. Alokasi sumber ekonomi akan selalu berjalan dengan aman dan tidak menghalangi arus sumber daya ekonomi antar daerah ataupun ekspor dan impor.
7. Memerhatikan sisi keahlian rakyat dan aspek keadilan. Contoh aspek keadilan antara lain ialah objek dan subjek pajak yang mesti akurat

sehingga dapat diamati pemungutannya, total pajak yang dibayarkan dapat ditaksirkan oleh wajib pajak dan harga pajak ditetapkan dengan melihat kondisi subjek pajak.

8. Aspek kemampuan rakyat. Pajak mesti mengkaji kesanggupan subjek pajak untuk menanggung beban pajak tambahan, sehingga beberapa dari beban pajak tersebut tidak dapat dikondisikan untuk masyarakat yang kurang berada.
9. Melindungi kelestarian lingkungan, di mana bahwa pengenaan pajak tak mengasih kesempatan kepada siapapun termasuk daerah, rakyat atau pemerintah pusat untuk membinasakan lingkungan.

2.3 Retribusi Daerah

Berlandaskan Undang-Undang tahun 2000 Nomor 4 pasal 1 ayat 26, "Arti retribusi ialah pungutan daerah terhadap izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan wajib retribusi (Putra, 2018:156)." Pengertian Retribusi adalah tagihan yang dijalankan oleh negara akibat dari menggunakan berbagai jasa yang diberikan oleh negara (Suandy, 2014:3). Prinsip dan asas umum yang berfungsi sebagai unsur retribusi yang dikenakan terurai dibawah yakni.

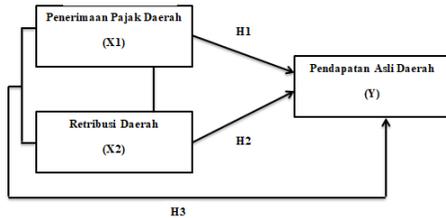
1. Kecukupan: Penggunaan jasa atau barang harus diterapkan terhadap retribusi untuk melakukan rasionalisme permintaan dari pengguna. Dengan adanya harga, maka titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu barang dapat dicapai, serta dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur jumlah penggunaannya pada suatu barang dengan adanya retribusi, agar dapat menyesuaikan kemampuan untuk membayar.
2. Keadilan: Keadilan adalah kriteria kedua yang perlu diterapkan. Prinsip keadilan perlu diterapkan pada tarif retribusi atau penetapan harga layanan. Jadi intinya, semua golongan dalam masyarakat harus

memikul beban pengeluaran pemerintah sesuai kemampuan dan kekayaan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi sesuai dengan kesanggupan pembayaran wajib retribusi, makin tinggi kesanggupan pembayaran mereka, maka semakin tinggi harga yang dibebankan daripada mereka yang mempunyai kesanggupan membayar lebih kecil.

3. Kemudahan Administrasi: Prinsip ketiga yaitu kemudahan administrasi. Hal ini terkait dengan teori *benefit principle* pada retribusi yang memiliki makna, yaitu retribusi tidak dibebankan kepada perorangan atau badan yang tidak menikmati manfaat jasa atau barang yang ada, berlaku sebaliknya dikenakan pada pihak yang merasakan dan menikmati manfaat yang ada. Secara teori, retribusi gampang dipungut dan ditaksir. Mudah dipungut karena rakyat hanya menerima apa yang mereka bayar, gampang ditaksir karena pertanggungjawaban berdasarkan tingkat pemakaian yang mudah dihitung.
4. Kesepakatan Politis: Retribusi daerah merupakan hal dari pemerintah daerah yang mesti diterima oleh semua pihak, itu sebabnya kesepakatan politis adalah prinsip keempat. Bagi mereka yang menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang dalam, maka harus ada kepastian hukum bagi mereka. Jadi diperlukan suatu kemampuan politik untuk menetapkan struktur tarif, retribusi dan cara memungut retribusinya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebanyak tiga variabel. Yang terdiri dari variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah serta variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai mengarah pada metode kuantitatif yang berarti bahwa metode penelitian tersebut dilakukan dengan maksud agar mengetahui relasi antara 2 variabel atau lebih. Serta tujuan lain dari metode kuantitatif adalah untuk menggunakan, mengembangkan, teori-teori, beberapa model matematis dari hipotesis bersangkutan pada fenomena alam. Penelitian kuantitatif sering dimanfaatkan untuk bidang alam/sosial. Agar penelitian lebih spesifik, maka *time series analysis* digunakan untuk penelitian ini. Data dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Batam sebagai objek penelitian. Dan badan pengelola pajak dan retribusi daerah dipilih sebagai lokasi yang mesti diteliti.

Variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah menjadi variabel terikat pada kajian ini. Semua laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli di Kota Batam menjadi populasi pada penelitian yang dilakukan serta segala laporan diatas selama tahun anggaran/tahun penelitian menjadi

sampel bagi peneliti. Teknik pengumpulan data pada pengkajian ini adalah dokumentasi, menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data yang dipakai adalah data *time series*. Teknik analisis data dalam penelitian yang sedang dilakukan terdiri dari statistik deskriptif. Kemudian uji asumsi klasik yang terurai menjadi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi. Setelah itu ada analisis regresi linear berganda. Selanjutnya uji hipotesis yang terbagi atas uji signifikan individu, uji signifikan simultan serta uji koefisien determinasi.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota batam.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Batam.

H3: Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2015:207), statistik yang berfungsi untuk mentelaah data dengan metode memaparkan atau menggunakan data yang sudah tergabung seadanya, tanpa memiliki maksud menarik kesimpulan yang berlaku umum adalah stastistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	51242571800	934458907796	399901279092	228264465493
X2	60	7038282000	94570998976	49217872162	26447594610
Y	60	69726154861	1147685950193	533476793766	294839152263
Valid N	60				

(listwise)

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

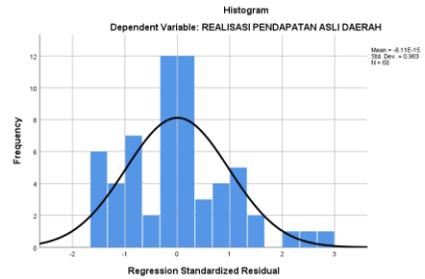
Pada tabel 1. X1 Adalah pajak daerah, X2 adalah retribusi daerah dan Y adalah pendapatan asli daerah. Pada tabel 1. juga dapat diketahui bahwa data yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 data dari tahun 2015-2019. Kolom minimum menunjukkan nilai paling rendah dari data untuk variabel X1 nilai

minimumnya adalah 51.242.571.800,20 untuk variabel X2 nilai minimumnya adalah 7.038.282.000,82 dan untuk variabel Y nilai minimumnya adalah 69.726.154.861,82. Sedangkan kolom maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari data untuk variabel X1 nilai maksimum adalah 934.458.907.796 untuk variabel X2 adalah 94.570.998.976,00 dan variabel Y adalah 1.147.685.950.193,30. Kolom *mean* merupakan kolom untuk menunjukkan rata-rata data yang diolah. Rata-rata variabel X1 adalah 399.901.279.092,7030, sedangkan rata-rata variabel X2 adalah 49.217.872.162,2586 dan rata-rata variabel Y adalah 533.476.793.766,4480. Dan pada kolom terakhir terdapat kolom standar deviasi dimana variabel X1 mempunyai standar deviasi sebesar 228.264.465.493,733, sedangkan variabel X2 mempunyai standar deviasi sebesar 26.447.594.610,3281 dan standar deviasi variabel Y sebesar 294.839.152.263,568

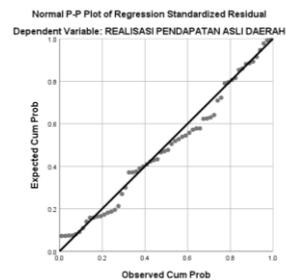
2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi normal.



Gambar 2. Bell Shaped Curve
(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Dari gambar 2. maka dapat disimpulkan bahwa model ini berdistribusi normal karena model itu menyerupai lonceng, *Bell Shaped Curve*.



Gambar 3. P-P Plot Standardized
(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan gambar 3. dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal maka diambil kesimpulan bahwa model ini berdistribusi normal. Untuk lebih meyakinkan lagi, maka data perlu diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0.0003906
	Std. Deviation	57707767749.94640000
Most Extreme Differences	Absolute	0.090
	Positive	0.090
	Negative	-0.069
Test Statistic		0.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Tabel 2. merupakan hasil uji normalitas setelah data penelitian ini di transform menggunakan rumus transform LG10.

Tabel 2. diatas menunjukkan hasil uji kolmogov-smirnov mempunyai angka probability Sig (2 tailed) sebanyak 0,200.

Angka 0,200 jelas lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa data memiliki angka distribusi normal.

4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk mengetahui jika dalam model regresi ditemukan kolerasi antara variabel

independen (Priyatno, 2016:116). Bila gejala multikolinearitas terjadi pada model persamaan, itu menandakan bahwa model persamaan tersebut telah mengalami gejala multikolinearitas. Jika angka VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance lebih besar 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Namun jika sebaliknya, maka terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Realisasi Retribusi Daerah	0.144	6.954
2	Realisasi Pajak Daerah	0.144	6.954

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan tabel 3. maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas dikarenakan nilai tolerance X1 dan X2 sebesar 0.144 dan angka tersebut lebih besar dari 0,10. Setelah itu, nilai VIF X1 dan X2 sebesar 6.954 dan lebih kecil dari 10. Maka penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

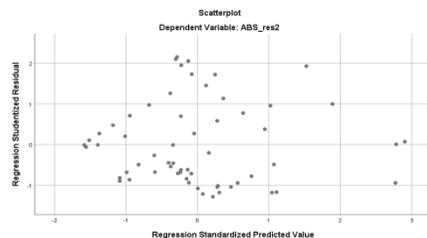
Menurut (Wibowo, 2012:93), uji yang memiliki untuk menguji apabila timbul ketidaksamaan residual atau varians dari pengamatan pertama ke pengamatan lainnya adalah uji heteroskedastisitas. Pada penelitian yang sedang dilakukan, uji heterokredastisitas dilakukan dengan uji Gleyser dan Scatterplot.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	0.628	0.431		1.457	0.151
1	Realisasi Pajak Daerah	-0.053	0.039	-0.460	-1.339	0.186
2	Realisasi Retribusi Daerah	5.311E-13	0.000	0.376	1.096	0.278

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan tabel 4. diatas, didapatkan angka signifikansi variabel realisasi pajak daerah sebesar 0,186 dan variabel realisasi retribusi daerah sebesar 0,278. Dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena angka signifikansi melebihi 0,05 (5%).



Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot
(Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Selain uji gleyser, pada gambar 4. hasil uji scatterplot pada gambar 4. juga

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokredastisitas dikarenakan titik-titik pada uji scatterplot tersebut tak terbentuk suatu pola yang teratur dan menyebar.

4.5 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	0.998	0.998	10290125499.79120	1.851

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan tabel 5. dapat kita ketahui bahwa angka DW (durbin-watson) adalah 1,851. Nilai du sama dengan 1,6518. Dengan demikian dapat kita gunakan $du < DW < 4 - du$. Dikarenakan hasilnya adalah $1,6518 < 1,851 < 2,3482$ maka ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Menurut (Wibowo, 2012:101), uji autokorelasi adalah uji yang berperan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar anggota berbagai data yang diamati. Hasil uji autokorelasi penelitian ini dapat adalah sebagai berikut.

4.6 Uji Signifikan Individu (uji T)

Uji Signifikan Individu (Uji T) adalah uji yang bertujuan untuk menguji jika variabel bebas yaitu realisasi pajak daerah (X1) dan realisasi retribusi daerah (X2) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu realisasi pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Individu

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	343889840.136	5780730933.692		-0.059	0.953
1 Realisasi Pajak Daerah	0.825	0.037	0.639	22.302	0.000
2 Retribusi Daerah	4.143	0.319	0.372	12.975	0.000

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Uji Hipotesis 1 (H1): Realisasi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 6. diatas, dapat diketahui realisasi pajak daerah memiliki nilai t hitung sebesar 22,302 lebih besar daripada t tabel 2,00247. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu realisasi pajak daerah berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

Uji hipotesis 2 (H2): Realisasi retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 6. diatas, dapat diketahui realisasi retribusi daerah

memiliki nilai t hitung sebesar 12,975 lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar 2,00247. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu realisasi retribusi daerah berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

4.7 Uji Signifikan Simultan

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji coba jika variabel bebas yaitu realisasi pajak daerah (X1) dan realisasi retribusi daerah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.10360708046176 000000000.000	2	2.551803540230880 000000000.000	5755.871	.000 ^b
2 Residual	2.52703362807054 000000000.000	57	4433392329948320 00000.000		
Total	5.12887741674247 000000000.000	59			

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan tabel 7. diatas dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 5755,871 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar .Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menafsirkan seberapa jauh kehebatan suatu model untuk memaparkan variabel terikat yaitu realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan daerah.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 ^a	.995	.995	21055622360.66253

(Sumber : Hasil olah data SPSS 25, 2020)

Berdasarkan tabel 8. diatas dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi (R square) memperoleh nilai sebesar 0,995 atau 99,5%. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah sebesar 99,5% sedangkan sisanya 0,5% dipengaruhi faktor lain selain dari variabel penelitian ini.

yaitu sebesar 2,00247. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05.

3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan diketahui nilai F hitung adalah sebesar 5755,871 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar .Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung sebesar 22,302 lebih besar daripada t tabel 2,00247. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung sebesar 12,975 lebih besar daripada t tabel

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, H., & Yando, A. D. (2018). MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, Vol.2 No.1, 29–40.
- Cornelis, V. I. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Lubis, S. H., & Yando, A. D. (2019).

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Medan. *Journal Of Accounting And Management Innovation*, Vol.3 No.1, 1–13.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik*. Yogyakarta: Penerbit MediaKom.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (1st ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. E. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.